



TALIBAN 2.0: TRANSISI PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK TALIBAN DALAM MEMBANGUN CITRA DEMOKRASI

Savinka Putri Andini¹⁾; Clarissa Andarini²⁾; Fadillah Rafli Anwari³⁾; Najwa Khabiza Egaikmal⁴⁾; Rizky Hikmawan⁵⁾

¹⁾ savinkand@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ andariniclarissaaa18@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ anwari.rafli25@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ nanakhabiza@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁵⁾ rizkyhikmawan@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The withdrawal of US troops in 2021 marks the return of the Taliban after two decades of absence from power in Afghanistan. As a result of the Taliban's poor track record with democracy and human rights, this group eventually lost legitimacy from the local community and recognition from other countries. Therefore, the emergence of Taliban, which was later dubbed as the "Taliban 2.0" regime, sought to improve its image towards a more moderate and democratic direction. This paper specifically discusses the Taliban's efforts to build an image of democracy through a transition process of political communication that is more modern and different from the previous period. The study method used is descriptive-qualitative and data collection through desk research method that uses literature study in the analysis process. The results of this study show that the changes in Taliban 2.0 are only to manipulate perceptions, while in reality the Taliban still has not really implemented a democratic and open government system. The changes made by the Taliban are considered only temporal until their political goals in gaining legitimacy can be achieved. The role of The United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA in this case is also calculated to oversee the mission of peace and uphold human rights in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, Democratization Image, Legitimacy, Politic Communication, Taliban

Abstrak

Penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021 menjadi pertanda kembalinya Taliban setelah dua dekade absen dari tampuk kekuasaannya di Afganistan. Akibat rekam jejak Taliban yang banyak bersinggungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, pada akhirnya membuat kelompok ini tidak mendapat legitimasi dari masyarakat lokal dan pengakuan negara lain. Oleh karena itu, kemunculan Taliban yang kemudian dijuluki sebagai rezim "Taliban 2.0" berupaya melakukan perbaikan citra ke arah yang lebih moderat dan peduli dengan demokrasi. Tulisan ini secara spesifik membahas upaya Taliban dalam membangun citra demokrasi melalui proses transisi komunikasi politik yang lebih modern dan berbeda dengan periode sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dan pengumpulan data melalui metode *desk research* yang menggunakan studi literatur dalam proses analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan dalam Taliban 2.0 hanyalah untuk memanipulasi persepsi, sementara pada kenyataannya Taliban masih belum benar-benar menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi dan terbuka. Perubahan yang dilakukan Taliban dinilai hanya bersifat temporal hingga tujuan politiknya dalam mendapatkan legitimasi dapat tercapai. Peran *The United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) dalam hal ini juga diperhitungkan untuk mengawal misi perdamaian dan penegakan hak asasi manusia di Afganistan.

Kata kunci: Afganistan, Citra Demokrasi, Komunikasi Politik, Legitimasi, Taliban

PENDAHULUAN

Apa yang terjadi di Afganistan saat ini merupakan konsekuensi atas buntut sejarah panjang carut-marut perpolitikan negara tersebut. Sebelum terjadinya konflik sengit dengan Amerika Serikat, Afganistan lebih dulu terjerat perang melawan Uni Soviet yang dimulai dari tahun 1979 hingga 1989. Pendudukan Soviet yang berumur satu dekade ini harus melalui banyak pemberontakan hingga mendorong terbentuknya kelompok milisi yang disebut Mujahidin untuk memerangi pemerintahan "boneka" ala Moskow. Kondisi Perang Dingin kemudian mendukung intervensi dari Amerika Serikat—rival utama Uni Soviet—untuk melakukan perimbangan di wilayah tersebut, yaitu dengan memberikan saluran bantuan kepada Mujahidin, mulai dari sokongan dana



hingga persenjataan. Mujahidin di bawah bayang-bayang Amerika Serikat—yang kemudian bergabung Arab Saudi dan Pakistan—mampu memukul mundur Uni Soviet hingga mengalami kekalahan mutlak.

Sepeninggalan Uni Soviet dari wilayah Afganistan nahasnya bukan menjadi kemenangan bagi masyarakat Afganistan untuk memperoleh perdamaian. Transisi dari pemerintahan buatan Soviet menuju bentuk negara Islam Afganistan justru menimbulkan sebuah krisis dari adanya perebutan kekuasaan faksi-faksi pecahan Mujahidin. Di antara faksi-faksi tersebut, munculah sebuah kelompok baru bernama Taliban yang terbentuk pada 1994, beranggotakan para pelajar muslim Sunni ber etnis Pashtun—kelompok etnis mayoritas di Afganistan. Taliban hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk mampu mengambil-alih Kabul hingga menduduki 90 persen wilayah Afganistan pada bulan September 1996 dan menggulingkan Najibullah, seorang pemimpin komunis terakhir di negara tersebut (Maizland, 2021).

Sejak resmi berada pada tampuk kekuasaan, Taliban di bawah pimpinan Mullah Umar mengatur negara sesuai ajaran Islam secara tradisional dan puritan yang berbasis pada ajaran Sunni Deobandi dan berakar pada pemikiran sekte Wahabi. Dalam pemerintahan yang diberi nama Emirat Islam Afganistan, hukum Islam resmi diangkat sebagai sumber perundang-undangan yang bersifat ultra-konservatif. Penerapan hukum Islam ini juga menyentuh pada kehidupan sipil seperti perintah laki-laki untuk berjenggot dan mengenakan serban, ataupun sejumlah larangan bagi kelompok perempuan yang menyangkut akses pendidikan, lapangan pekerjaan, bepergian tanpa didampingi mahram, dan kewajiban menggunakan burkak di tempat umum (Ashghor, 2021).

Kehadiran Taliban pada mulanya mendapat respon positif dari masyarakat Afganistan dengan anggapan telah mengembalikan stabilitas nasional setelah ketegangan yang cukup panjang. Namun pada implementasinya, Taliban dianggap banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang merugikan masyarakat. Gerak-gerak masyarakat diharuskan sesuai dengan syariah Islam sampai-sampai dibentuk sebuah biro khusus keagamaan yang disebut Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan polisi agama sebagai pengawas. Telah menjadi sesuatu yang awam di Afganistan pada era tersebut akan kehadiran patroli untuk mencari kesalahan-kesalahan masyarakat yang tidak sesuai dengan penegakan syariah. Hukuman yang diberlakukan untuk pelanggar juga dijalankan berdasarkan pedoman Islam, seperti hukuman cambuk bagi pezina dan potong jari untuk pelaku pencurian. Penerapan berbagai peraturan tersebut diyakini Taliban sebagai sebuah upaya untuk mencegah demoralisasi dan tindak kriminal yang terjadi di Afganistan, namun kenyataannya hal tersebut mencederai hak-hak masyarakatnya sendiri, terutama perempuan dan anak. Sepanjang tahun 1996 sampai 2001, rezim islamis ekstrem Taliban menjadikan Afganistan sebagai negara yang memiliki angka harapan hidup terendah di dunia (Febriana, 2021).

Identitas Taliban yang memegang paham Islam konservatif menjadikan wilayah Afganistan sebagai basis pembentukan dan pusat suaka bagi para mujahidin dari negara lain, seperti relasi Taliban dengan Al-Qaeda dan pemberian perlindungan terhadap Osama bin Laden pasca serangan *World Trade Center* (WTC) 11 September 2001. Hal ini menjadi babak perkara baru dengan munculnya intervensi Amerika Serikat yang melengserkan rezim Taliban karena diduga berkolusi dalam kasus teror Al-Qaeda pada peristiwa 9/11 tersebut. Persengkongkolan Taliban dengan Al-Qaeda membuat kelompok tersebut terseret sebagai objek kriminal yang harus diperangi, tepat 7 Oktober 2001 Amerika Serikat menerjunkan pasukan *International Security Assistance Force* (ISAF) di Afganistan yang bertujuan menumpas jaringan terorisme global (Prasetyo, et. al, 2022). Selain itu, kondisi keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Afganistan yang memprihatinkan mendorong terbentuknya *United Nation Assistance Mission in*



Afghanistan (UNAMA) pada Maret 2002 untuk membantu pemerintah baru Afganistan menciptakan ekosistem perdamaian yang berkelanjutan (UNAMA, 2020).

Selama kurang lebih dua dekade, Taliban melakukan operasi bawah tanah dengan melakukan serangkaian aksi teror dan bom, sembari memperkuat jaringan aliansi dengan ISIS dan kelompok milisi di Pakistan. Stabilitas Afganistan yang semakin terancam kemudian mendorong Amerika Serikat dan sejumlah negara untuk segera menemukan resolusi. Hal ini kemudian melatarbelakangi terselenggaranya Pertemuan Doha pada bulan Februari 2020 yang berujung pada sebuah kesepakatan di antara tiga pihak, yaitu Amerika Serikat, Afganistan, dan Taliban. Kesepakatan yang disebut sebagai Perjanjian Doha menghasilkan keputusan bahwa Amerika Serikat harus menarik pasukannya secara penuh, sementara Taliban tidak lagi melakukan rekrutmen dan diharuskan mencegah pengaruh ekstrimis—seperti Al-Qaeda—yang mengancam Amerika Serikat dan sekutunya (Thomas, 2021).

Selang beberapa pekan saja setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, pada 15 September 2021 Taliban sudah berhasil mendapatkan kembali kekuasaannya di ibu kota Kabul dan hampir keseluruhan wilayah Afganistan. Taliban saat ini meluncurkan wajah baru dengan menyatakan diri siap melakukan transformasi untuk membangun Afganistan yang lebih demokratis dan moderat di bawah kepemimpinannya. Rezim baru yang dijuluki “Taliban 2.0”, mereka berjanji akan memperhatikan hak perempuan, kebebasan pers, dan menghindari perlawanan dengan pihak asing. Upaya Taliban untuk meninggalkan kesan konservatif merupakan strategi untuk memperoleh pengakuan lokal dan internasional yang tak lain adalah untuk melanggengkan legitimasinya di Afganistan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji transisi politik komunikasi Taliban 2.0 yang sifatnya lebih moderat dalam pemulihan citra. Dalam proses penegakan demokrasi dan HAM, akan lebih tepat apabila menyebutkan peran *The United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) yang menjadi instrumen internasional dalam menciptakan stabilitas Afganistan sekaligus menekan posisi Taliban. Selain itu, artikel ini juga berusaha menjawab pertanyaan, apa yang menjadi pembeda dari citra Taliban di masa lampau dengan Taliban saat ini? Dan bagaimana realitas perkembangan demokrasi dan HAM di Afganistan sejak diperintah oleh rezim neo-Taliban?

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Komunikasi Politik

Strategi Komunikasi Politik pada dasarnya merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh tujuan politik tertentu, dan istilah strategi sendiri memiliki akar kata dalam bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti memimpin dalam konteks militer. Awalnya, istilah ini secara khusus merujuk pada rencana yang digunakan oleh jenderal untuk mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Namun, seiring perkembangannya, konsep ini juga diterapkan dalam konteks non-militer, termasuk dalam bidang politik (Schäfer, 2021).

Pentingnya strategi dalam konteks politik dapat dipahami melalui pemahaman tentang berbagai pendekatan yang digunakan oleh organisasi politik untuk mencapai misi mereka. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi (Nounkeu, 2020). Strategi di sini bukan hanya sekadar rencana, melainkan juga melibatkan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, strategi tidak hanya memberikan arah, tetapi juga harus memperhitungkan taktik operasional yang diperlukan.

Beberapa definisi strategi politik telah diajukan oleh para akademisi. Contohnya De Bruycker dan Rooduijn pada tahun 2021 mengidentifikasi lima definisi yang berbeda, yang



mencakup strategi sebagai rencana, pola, posisi, taktik, dan perspektif. Pertama, strategi sebagai rencana mengacu pada program terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, strategi sebagai pola menyoroti konsistensi dalam perilaku yang telah terjadi sebelumnya. Ketiga, strategi sebagai posisi berkaitan dengan penetapan atau penentuan merek atau produk dalam pasar. Keempat, strategi yang sebagai taktik melibatkan serangan yang direncanakan untuk mengelabui atau mengalahkan pesaing. Kelima, strategi yang sebagai perspektif menekankan penggunaan teori dan pemikiran rasional atau ideologis dalam pelaksanaan strategi.

Persepsi dan Citra Nasional

Dalam lingkup hubungan internasional, pentingnya menganalisis persepsi dan citra nasional telah diakui, dengan menggabungkan perspektif dari berbagai pakar. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Teori Citra yang diperkenalkan oleh Frank Jefkins, yang menyoroti peran citra atau stereotip dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat internasional (La Ode Syaiful Islamy, 2018). Teori ini menegaskan bahwa bagaimana negara melihat satu sama lain berdampak signifikan pada pembentukan kebijakan dan tindakan yang diambil. Pendapat Fisher memperkuat ide ini dengan menunjukkan bahwa respon individu atau negara terhadap suatu peristiwa tidak hanya didasarkan pada fakta empiris, melainkan juga pada citra atau persepsi tentang peristiwa tersebut. Citra negara, menurut Teori Citra, dapat menjadi faktor penentu utama dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, bahkan lebih penting daripada kekuatan militer atau ekonomi (Rosyidin, 2018). Oleh karena itu, diplomasi dan diplomasi publik menjadi sangat penting dalam membentuk citra yang diinginkan di masyarakat internasional.

Untuk memahami bagaimana citra nasional terbentuk, penting untuk mempertimbangkan peran pesan atau komunikasi yang disampaikan oleh negara tersebut melalui berbagai saluran, seperti pemimpinnya, elit, atau hubungan antarwarga. Pesan-pesan ini mempengaruhi citra sebuah negara di mata negara lain, menjadikan diplomasi instrumen krusial dalam mengelola citra nasional. Dalam era teknologi dan internet, interaksi antarwarga semakin berperan dalam membentuk citra, seiring dengan pandangan Jervis yang menyoroti pentingnya pendapat massal dalam era globalisasi ini.

Selain itu, negara-negara berupaya mengelola citra mereka melalui strategi-strategi beragam, termasuk melalui institusi budaya, media, dan program pertukaran pendidikan. Peran teknologi dan media sosial juga menjadi penting dalam membentuk dan mengelola citra nasional, dengan negara-negara yang memiliki kendali atas teknologi tersebut cenderung lebih berhasil dalam mempengaruhi persepsi internasional terhadap mereka. Kemajuan teknologi memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan dapat diakses langsung oleh masyarakat, menjadikan diplomasi publik semakin relevan dalam membentuk citra nasional yang diinginkan.

Namun, perlu diingat bahwa persepsi citra nasional tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi resmi dari pemerintah, tetapi juga oleh interaksi antara individu dan kelompok dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kerangka teoritis ini, perlu mempertimbangkan peran berbagai pihak, termasuk elit kebijakan, pemimpin negara, birokrasi, politik domestik, dan lingkungan internasional, dalam membentuk dan mengelola citra nasional. Dengan demikian, kerangka teoritis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana persepsi citra nasional dapat mempengaruhi hubungan internasional, serta bagaimana negara-negara berupaya mengelola citra mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dalam arena internasional.

Konsep Demokrasi dan HAM

Melihat dari kacamata etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan mutlak). Setelah Perang Dunia II usai, penyebaran konsep dan nilai-nilai demokrasi—atau yang dapat disebut sebagai demokratisasi—mulai meluas. Pada



hakikatnya, demokrasi adalah konsep yang mengakui dan mengafirmasi suara dan afirmasi mayoritas dalam kegiatan bernegara. Sebagaimana yang telah disepakati pada *Vienna Declaration and Programme of Action*, bahwa dasar dari demokrasi adalah kebebasan untuk menyatakan keinginan dalam menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya melalui proses partisipasi secara menyeluruh (OHCHR, 2024). Dalam tulisan ini, pengertian demokrasi yang menjadi kerangka pemikiran penulis adalah pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang meniadakan absolutisme kekuasaan negara. Negara dengan pemerintahan yang absolut, menurut John Locke, akan mengabaikan hak-hak manusia. Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat terlepas dari kesadaran dalam memenuhi hak-hak asasi manusia. Dalam buku *The Second Treatise of Government* yang terbit pada tahun 1690, ia berusaha untuk menjelaskan bahwa manusia hidup setara tanpa ketundukan dan orang-orang yang terpilih untuk menjalankan negara sejatinya memiliki kontrak dengan rakyat dalam cita-cita kesejahteraan. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan yang sah adalah yang didasarkan pada persetujuan yang diperintah, yaitu rakyat (Britannica, 2024). Dengan begitu, demokrasi dapat dilihat sebagai konsep yang menekankan kesetaraan hak-hak manusia dan penggunaan keputusan kolektif dalam kegiatan bernegara.

Demokrasi memiliki elemen-elemen kunci yang membentuknya. Akan tetapi, menurut Paula Becker dan Jean-Aimé A. Raveloson, demokrasi bukan merupakan sebuah bangunan permanen yang tidak akan berubah, melainkan sebuah proses yang harus dikonsolidasikan secara terus menerus. Hal ini berarti negara yang demokratis tidak semata-merta ditandai dengan adanya tiga kekuasaan terpisah, adanya pemilu, dan warga negara yang mencalonkan diri saja, melainkan juga dengan mengedepankan cara berpikir dan berperilaku sesuai nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu, selain transisi demokrasi, aspek lain yang penting adalah konsolidasi demokrasi untuk mencegah erosi demokrasi, keterbalikan demokrasi, dan sebaliknya, memperkuat pendalaman demokrasi (Asyari dan Jaya, 2019). Adapun, tidak ada parameter yang pasti untuk mengukur apakah suatu negara dikatakan demokrasi secara menyeluruh atau tidak. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi dapat dianalisis dengan melihat apakah prinsip-prinsip demokrasi diterapkan oleh suatu negara. Menurut Robert A. Dahl, prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek keputusan pemerintah yang dapat dikontrol, jujur dalam proses pemilihan, adanya hak untuk memilih pemimpin dan dipilih, adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat, diperbolehkan untuk menerima dan mengakses informasi, dan kebebasan untuk berserikat (Syafuri, 2018).

Dalam prosesnya, demokrasi mengalami perkembangan yang menyebabkan model-model demokrasi menjadi lebih banyak dan beragam, Namun, nilai yang berusaha untuk ditekankan dalam konsep demokrasi adalah peran suara rakyat dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi berusaha mengakui adanya pluralisme dalam berbagai aspek kehidupan yang membutuhkan keterbukaan satu sama lain. Setiap negara yang berusaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokratis dalam kehidupannya akan secara otomatis menerapkan ideologi dan pandangan yang terbuka.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui metode *desk research*. Penelitian deskriptif-kualitatif sendiri mengacu kepada jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang bersifat alamiah dan peneliti merupakan instrumen utama dari proses penelitian, hasil dari penelitian kualitatif juga menekankan pada makna secara khusus dibandingkan secara umum (Priadana & Sunarsi 2021). Analisis penelitian tidak menggunakan angka-angka, melainkan menggunakan



sumber tertulis yang memuat bahasa yang sistemik dan sistematis (Werdiningsih, E., & B, A. H, 2022). Dalam penelitian ini proses analisis dilakukan melalui pengumpulan data dengan metode *desk research* studi literatur, yaitu materi yang didapat diterbitkan melalui sebuah laporan dan dokumen serupa yang dapat diakses melalui situs *web*, data yang diperoleh dari hasil survei, perpustakaan umum, maupun penyimpanan data dari organisasi-organisasi terkait. Metode penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan data secara keseluruhan, kemudian diringkas secara signifikan untuk mendapatkan data yang efektif digunakan dalam penelitian. Dalam artikel ini data-data yang ditemukan diambil melalui situs web jurnal, media daring, dan *website* resmi organisasi internasional terkait.

Dalam metode penelitian deskriptif-kualitatif terdapat pendekatan yang dapat dilakukan melalui sejarah dan diperkuat melalui pendekatan analisis studi kasus. Pendekatan sejarah dilakukan melalui pengertian terkait asal-usul, riwayat, dan peristiwa di masa lalu. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui latar belakang dari keberadaan kelompok Taliban di Afghanistan dari masa lampau hingga masa kini, serta sebagai tolak ukur perkembangan cara berkomunikasi kelompok Taliban pada masa lampau dan masa kini. Sedangkan pendekatan melalui analisis studi kasus, dilakukan melalui kasus yang terjadi dari waktu ke waktu secara rinci dan mendalam (Werdiningsih, E., & B, A. H, 2022). Fokus analisis dilakukan melalui dasar teori komunikasi politik, persepsi dan citra nasional, serta demokrasi dan HAM. Dan hasil akhir dari penelitian ini akan melihat hasil dari strategi transisi komunikasi politik Taliban dalam membangun citra demokrasi di Afghanistan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Komunikasi Taliban pra-2021

Salah satu perubahan paling mencolok dalam kebijakan Taliban adalah penanganan mereka terhadap media dan komunikasi. Selama masa berkuasa sebelum jatuhnya pada tahun 2001, Taliban melarang menonton TV dan lebih mengutamakan komunikasi dengan penduduk melalui media cetak, radio, dan sering kali tatap muka dengan masyarakat lokal. Penggunaan telepon, terutama telepon satelit jarang pada masa itu untuk bisa dikuasai oleh Taliban. Pada pembahasan ini, penting untuk memeriksa gaya komunikasi utama yang digunakan Taliban sebelum peristiwa pada Agustus 2021 secara lebih rinci.

Kontak media (radio, televisi, dan surat kabar)

Kelompok pemberontak di Afghanistan mulai memanfaatkan media sebagai sarana untuk mempromosikan diri pada pertengahan tahun 1980-an ketika melawan pasukan Soviet. Ini menjadi strategi vital dalam mendapatkan rekrutan, serta dukungan finansial dan militer. Meskipun juru bicara Taliban diduga berbasis di Pakistan seperti penangkapan Hakimi di perbatasan Afghanistan–Pakistan, Taliban tampaknya memiliki kemampuan untuk berpindah antara kedua negara, mereka juga memastikan bahwa kontak mereka dapat diakses oleh media internasional seperti *Radio Free Europe/Radio Liberty*, *Al Jazeera*, *Associated Press*, dan *Reuters*, serta media regional seperti *Afghan Islamic Press* dan *Dawn*.

Tidak mudah untuk mengidentifikasi dengan pasti siapa juru bicara resmi Taliban. Mereka yang mengklaim mewakili Taliban menggunakan berbagai alat komunikasi seperti telepon genggam, telepon satelit, dan *fax*. Media lokal di Pakistan memberikan platform kepada Taliban untuk menyampaikan pandangan mereka, namun semakin banyak Taliban menyadari pentingnya berinteraksi dengan media internasional. Mullah Dadullah, seorang mantan komandan Taliban yang tewas oleh pasukan AS pada Mei 2007, menjadi tokoh yang menonjol dalam melakukan wawancara televisi (Anas, 2019). Pada April 2005, dilaporkan bahwa Taliban berhasil mendirikan



stasiun radio seluler yang beroperasi dari Afganistan (Liwal, 2021). Hal ini mungkin mengindikasikan beberapa kendala teknis yang dihadapi Taliban dalam menghadapi jenis media tertentu.

Klaim Pertempuran Taliban

Pernyataan mengenai kinerja pertempuran Taliban telah menjadi sorotan melalui juru bicara media mereka. Dalam hal ini, tidak jarang terjadi informasi yang hiperbola dan distorsi terkait beberapa hal seperti jumlah korban yang diakibatkan pada pasukan koalisi, *International Security Assistance Force* (ISAF), klaim penembakan pesawat koalisi atau ISAF, penculikan atau penangkapan warga sipil atau personel militer, serta sistem senjata yang tersedia untuk Taliban, termasuk misil permukaan-ke-udara (Rostow, 2022).

Terdapat beberapa alasan di balik distorsi semacam ini, mulai dari pemalsuan yang disengaja demi kepentingan propaganda hingga kebutuhan mendesak untuk menyampaikan informasi secara cepat. Di samping itu, ada juga keyakinan yang kuat akan keabsahan informasi yang disampaikan serta kesulitan dalam memverifikasi informasi yang mungkin tidak dapat dipercaya, terutama dalam suasana konflik (Napier, 2023). Taliban sering kali mengklaim bahwa kecelakaan helikopter koalisi dan ISAF yang disebabkan oleh kegagalan mekanis adalah hasil dari aksi pemberontakan mereka. Bahkan sebagian dari pimpinan Taliban dan juru bicara media meyakini bahwa para pejuang mereka bertanggung jawab atas hal tersebut.

Taliban tampaknya sadar bahwa media internasional cenderung menyiarkan klaim-klaim mereka, memberikan publisitas yang luas dengan usaha yang cukup minim. Klaim-klaim yang salah atau tidak akurat justru dapat menguntungkan Taliban dalam hal ini. Banyak dari pendengar di Afganistan dan Pakistan, terutama di wilayah suku Pashtun di kedua sisi perbatasan Afganistan–Pakistan yang cenderung kurang terdidik dan memiliki akses terbatas pada sumber informasi publik cenderung memiliki simpati terhadap Taliban. Hal ini membuat mereka cenderung memberikan kredibilitas pada klaim-klaim Taliban tanpa mempertimbangkan logika berpikirnya.

Komunikasi dengan Masyarakat Lokal

Night Letters

Surat-surat misterius, seringkali dikenal sebagai "*Night letters*", adalah bentuk komunikasi yang unik yang digunakan oleh Taliban sebelum tahun 2021 untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka berupa selebaran atau surat yang dipasang di pintu-pintu atau dinding-dinding rumah untuk memberi informasi, mengancam, atau memberikan nasihat kepada penduduk setempat (Oluwashakin, 2022). Dalam daerah di mana akses ke media lain terbatas, surat-surat malam menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Isi dari surat-surat malam ini biasanya berisi peringatan atau instruksi kepada penduduk setempat, seperti peringatan untuk tidak berinteraksi dengan orang asing atau menghindari mengirimkan anak-anak ke sekolah. Beberapa surat bahkan ditujukan secara pribadi kepada individu tertentu.

Surat-surat malam ini sangat bervariasi dalam isi dan nada, jarang sekali memberikan kesan bahwa ada pesan terkoordinasi yang disampaikan secara luas kecuali dalam pengertian yang sangat umum. Misalnya, '*Islamic Emirate of Afghanistan*' sebuah surat mungkin berisi ancaman kepada guru-guru dan pegawai yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan asing, memberi mereka tenggat waktu tiga hari untuk menghentikan pekerjaannya. Sementara surat lainnya menekankan larangan bagi warga untuk bekerja sama dengan orang asing dalam bentuk apapun (Suhrke & Schmeidl, (2023).

Pesan-pesan dalam surat-surat malam ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan Taliban bahwa mereka beroperasi di daerah tersebut. Selain itu, surat-surat malam seringkali diikuti oleh



tindakan langsung seperti pembakaran sekolah atau eksekusi terhadap "*American spies*". Korban-korban dari tindakan ini sering kali adalah warga desa yang dilihat berbicara dengan tentara koalisi atau orang-orang yang dianggap oleh Taliban setempat sebagai pembawa dendam suku.

Meskipun metode komunikasi ini tidak selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat, namun dampaknya cukup signifikan. Masyarakat sering kali menjadi enggan untuk terlibat dengan komunitas internasional atau pemerintah Afganistan karena takut akan tindakan pembalasan dari pihak Taliban.

Kontak langsung dengan penduduk Lokal

Sebagian besar warga Afganistan tidak memiliki akses ke televisi atau radio, ataupun internet. Meskipun berbicara langsung dan menyebarkan selebaran membutuhkan banyak tenaga kerja dan memiliki jangkauan cukup terbatas, tetapi seringkali merupakan cara paling efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat (Sidiq, 2022). Metode sederhana ini memiliki keuntungan tambahan bagi Taliban karena cukup sulit bagi ISAF untuk mengintersepsinya. Di selatan Afganistan misalnya, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penduduk Pashtun. Tak hanya itu, banyak pejuang yang merupakan penduduk lokal, sehingga mudah untuk mendekati suku-suku tersebut dan mencoba untuk meyakinkan mereka. Jika tidak untuk bertempur untuk mereka, setidaknya untuk berkerjasama atau membiarkan kegiatan Taliban tanpa intervensi atau gangguan dari luar. Kekhawatiran komunitas lokal atas isu-isu seperti *eradicating poppy* dan serangan udara ISAF dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan. Ancaman pembalasan juga lebih persuasif di mana Taliban telah dapat membentuk keberadaan semi-permanen; sesuatu yang secara nyata telah sulit dilakukan oleh pasukan ISAF dan Pemerintah Afganistan (Bose, 2020).

Di beberapa daerah, cukup banyak penduduk yang semakin beralih ke pengadilan yang dikelola oleh Taliban, yang dianggap lebih efektif dan adil daripada sistem resmi yang cenderung korup. Jenis kegiatan semacam ini, jika terus berlanjut dan berkembang, akan mengirimkan pesan kuat bahwa Taliban kembali secara lebih permanen. Namun, sebagian besar kelompok etnis Afganistan selain Pashtun sangat bermusuhan terhadap Taliban, membuat upaya untuk meyakinkan atau bernegosiasi dengan mereka menjadi hal yang sulit (Seddiqi, 2020). Namun, kesuksesan Taliban pada tahun 1990-an banyak didasarkan pada mendapatkan loyalitas suku-suku secara sementara, dan bukan karena benar-benar memenangkan hati dan pikiran suku-suku tersebut.

Target regional dan internasional yang Lebih luas

CDs, DVDs dan videotape

Media penyimpanan data seperti CD, DVD, dan *videotape* telah menjadi alat utama dalam upaya Taliban untuk memperluas pengaruh mereka. DVD disebar dengan cara yang mirip dengan distribusi selebaran pada masa lalu, dan kontennya sebagian besar berisi rekaman serangan pemberontak atau eksekusi terhadap mereka yang dituduh sebagai mata-mata (Scrivens & Conway, 2019). Penggunaan media ini tidak hanya mencerminkan kemampuan Taliban yang semakin meningkat dalam mengadopsi strategi dari kelompok pemberontak atau teroris lainnya, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan industri lokal yang mampu memproduksi informasi *audio* dan *video* secara massal. Hal ini juga menyoroti kesadaran Taliban akan kekuatan teknologi *modern* dalam mendukung tujuan mereka, sebagaimana yang diamati dalam berbagai kelompok pemberontak di Irak.



Internet

Adopsi teknologi internet telah menjadi langkah signifikan bagi Taliban. Mereka telah menciptakan setidaknya satu situs *web*. Meskipun sederhana, situs tersebut mencantumkan serangkaian serangan yang dilaporkan dan dilakukan oleh Taliban, namun memang banyak diantaranya mungkin tidak dapat dikonfirmasi aktualitasnya. Di dalam bagian berbahasa Inggris, situs ini menyajikan rincian serangan terbaru, klip video, dan tautan ke situs-situs jihadis lainnya, termasuk di Irak. Meskipun tidak ada upaya yang signifikan untuk mempromosikan pandangan atau pesan selain jihad, Taliban kadang-kadang memposting instruksi atau memberikan komentar, bahkan berusaha membantah laporan-laporan yang tidak menguntungkan bagi mereka (Harmon & Bowdish, 2018).

Upaya Pemulihan Citra Demokrasi Era Taliban 2.0

Perjanjian Doha pada tahun 2020 menjadi tonggak kemenangan Taliban untuk merebut kembali kiprahnya di Afganistan setelah 20 tahun lamanya berperang melawan Amerika Serikat. Momentum kebangkitan ini lantas tidak serta-merta dimanfaatkan Taliban hanya untuk memberi komando perintah kepada masyarakat saja, namun ada pula keinginan untuk merubah reputasi ke arah yang lebih moderat, toleran, dan diplomatis. Taliban dalam hal ini juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain untuk rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan di Afganistan (Ahmadzai, 2022).

Munculnya Taliban 2.0—sebuah istilah yang menandakan kebangkitan rezim lama Afganistan—disambut dengan keadaan negara yang kurang menguntungkan sekaligus mendesak posisi rezim baru tersebut. Lemahnya ekonomi negara menjadi tantangan terbesar, isu yang paling mendapat perhatian besar yaitu kasus kelaparan akibat kurangnya sumber daya pangan. Berdasarkan survei dari *World Food Program* (WFP), persentase keluarga yang mampu memperoleh makanan sehari-hari hanya sebesar lima persen dari jumlah populasi keseluruhan (WFP, 2021). Selain masalah kelaparan, memburuknya perekonomian Afganistan juga diperparah dengan Pandemi COVID-19 yang notabene memberikan efek stagnan pada ekonomi global. Adapun kembalinya Taliban sebagai pemerintahan juga menyebabkan pembekuan bantuan internasional, sebelumnya Afganistan mendapatkan sejumlah bantuan internasional yang jumlahnya 40% dari PDB negara (Rahman, 2022). Terdapat pula masalah lainnya, yaitu pemblokiran akses Taliban terhadap aset Bank Sentral Afganistan senilai US\$10 miliar yang disimpan di luar negeri. Kasus ini dapat dikatakan merupakan upaya Amerika Serikat untuk memberikan tekanan terhadap rezim tersebut agar tidak bisa masuk ke dalam sistem keuangan global.

Memburuknya perekonomian selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu untuk mengantarkan Afganistan dengan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, Taliban sadar hal tersebut perlu menjadi pertimbangan serius. Salah satu sumber masalah yang kemudian dipahami oleh Taliban adalah pengaruh legitimasi, baik itu dalam cakupan domestik maupun internasional, terhadap citra rezim tersebut. Keadaan masyarakat yang masih terpecah-pecah dan ketidakpercayaan publik akibat masa kelam terhadap Taliban 1.0 membuat rezim ini sebenarnya menghadapi kesulitan untuk mendominasi seluruh masyarakat Afganistan. Sehingga apa yang menjadi ideal bagi Taliban adalah sebuah bentuk pemerintahan inklusif yang mampu mewakili seluruh kepentingan masyarakat Afganistan.

Sementara itu, legitimasi internasional memiliki pengaruh yang lebih besar lagi terhadap motivasi Taliban untuk melakukan transformasi. Sampai saat ini, belum ada satupun negara yang menyatakan pengakuannya terhadap Taliban sebagai rezim yang sah. Padahal pengakuan



internasional merupakan insentif terbesar bagi Taliban untuk dapat berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperoleh haknya di Dana Moneter Internasional (IMF), dan menuntut Amerika Serikat atas kasus pembekuan aset yang telah disinggung sebelumnya (Jensen & Macdonald, 2023).

Legitimasi yang menjadi urgensi bagi rezim 2.0 ini utamanya menuntut sebuah perubahan dalam struktur Taliban. Untuk memperoleh sebuah legitimasi, Taliban harus mampu merombak citranya yang dikenal kejam, melanggar Hak Asasi Manusia, dan penganut Islam fundamentalis. Taliban saat ini juga berupaya melepaskan diri dari predikat 'teroris' yang menjadi kekhawatiran global karena rekam jejaknya sebagai rumah bagi kelompok militan dan pengaruhnya terhadap gerakan terorisme transnasional. Misalnya, terdapat ketakutan Pakistan yang dilatarbelakangi oleh maraknya serangan *Tehreek-e Taliban Pakistan* (TTP) yang berafiliasi dengan Taliban di Afganistan. Respon Tiongkok kurang lebih serupa dengan Pakistan yang memaknai kebangkitan Taliban 2.0 sebagai potensi perlindungan bagi kelompok militan separatis Uighur. Dengan demikian, pemerintahan Taliban 2.0 dapat berhasil memperoleh pengakuan internasional apabila mereka membenahi kualitas demokrasi, keamanan, dan perdamaannya (Narayan, 2022).

Dalam upaya membangun citra positif, Taliban membuktikan perubahannya melalui pendekatan komunikasi politik. Jika sebelumnya Taliban selalu terlihat brutal dan kontra terhadap hak perempuan, saat ini mereka berusaha tampil moderat dan menghindari represi dalam sorotan internasional. Taliban juga mengandalkan strategi hubungan masyarakatnya melalui media sosial dengan berbagai platform yang tersedia. Hanya selang beberapa waktu sejak pendudukan kembali Taliban tahun 2021, akun pro-Taliban melonjak secara mendadak. Akun ini aktif menyebarkan unggahan narasi dan video yang berisi konten positif atau bahkan mengagung-agungkan citra dari Taliban itu sendiri. Akun pro-Taliban sangat waspada dan menghindari unggahan konten yang terindikasi mendukung kekerasan dan kebencian atau lebih tepatnya melanggar regulasi perusahaan media sosial. Kesan baru yang hendak ditonjolkan Taliban dapat kita lihat dalam unggahan sederhana seperti foto atau video para pejuang yang sedang berolahraga, makan es krim, dan berpenampilan menarik (Saeed, 2021). Selain itu, salah satu akun Twitter resmi Taliban juga kedapatan mengunggah sebuah video anak-anak perempuan bersekolah, seakan-akan memamerkan kepedulian Taliban terhadap hak perempuan. Padahal apabila dibandingkan dengan periode yang lalu, Taliban menolak segala kegiatan yang sifatnya modern–bertentangan dengan syaria Islam–dan peran perempuan secara gamblang.

Alih-alih membuat pesan dalam video bernuansa mencekam dengan latar gua, Taliban 2.0 kini beranjak memanfaatkan ruang digital. Rezim Taliban pada tahun 1996 sampai 2001 menolak keras aktivitas yang berhubungan dengan fotografi, televisi, dan internet, karena dinilai bertentangan dengan pemahaman Islam yang mereka yakini. Taliban yang baru sontak mengubah sikapnya terhadap media, yaitu menjadi lebih ramah dengan pers dan mencoba beradaptasi dengan tren digital untuk menyebarkan informasi. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid bahkan mengatakan bahwa penggunaan teknologi modern tidak bertentangan dan syariat Islam, kelompok tersebut justru menganggap media sebagai salah satu bagian dari perjuangan mereka (Pratiwi, 2019).

Transisi komunikasi politik menuju ke arah yang lebih modern digarap secara serius oleh Taliban. Setiap konten yang berbentuk audio, video, dan tulisan akan berada di bawah pengawasan ketat komisi kebudayaan. Selain itu, terdapat pula tim khusus media sosial yang tugas utamanya menjaga tagar Taliban agar selalu tren di Twitter dan menyebarluaskan pesan melalui WhatsApp ataupun Facebook. Tim media sosial ini juga memberikan insentif sejumlah 1.000 Afgani (setara



dengan Rp164.000) per bulan untuk biaya internet kepada mereka yang dijuluki “pejuang medan perang *online*.” Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, Taliban tak tanggung-tanggung mengakomodasi perlengkapan multimedia yang canggih (Atiq, 2021)

Kendati demikian, citra demokrasi yang ditunjukkan Taliban 2.0 tak dipungkiri hanyalah sebuah retorika dan propaganda belaka. Penerimaan Taliban terhadap teknologi digital bukan berarti bukti mereka membela demokrasi dan hak asasi manusia, namun hanya untuk kepentingan kelompok yang sedang mengejar legitimasi internasional. Melihat tindakan yang diambil Taliban saat ini terdapat tiga kemungkinan untuk memproyeksikan komunikasi politik Taliban di masa depan.

Kemungkinan pertama, citra moderat Taliban sifatnya hanya temporal hingga masa transisi usai. Setelah mendapat pengakuan dari berbagai negara dan situasi domestik yang sudah netral, selanjutnya Taliban akan kembali ke setelan awal sebagai kelompok yang berideologi konservatif dan ekstremis. Kemungkinan kedua, Taliban tidak menghilangkan sikap moderatnya, namun hal ini tidak berlaku setiap saat atau dalam artian sifatnya pragmatis tergantung situasi dan kepentingan politis belaka. Sementara kemungkinan terakhir adalah Taliban terlena dengan kemudahan dan kemaslahatan dari rezim moderat, sehingga pemahaman itu menjadi karakter baru bagi kelompok tersebut dan lekas meninggalkan ideologi Islam fundamentalis.

***United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) sebagai Instrumen Internasional Dalam Mencapai Stabilitas dan Kedaulatan Afganistan**

Serangkaian konflik yang terjadi di Afganistan sebagian besar disebabkan oleh gagalnya penerapan unsur-unsur demokrasi yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik dari para elit politik Afganistan yang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencapai perdamaian. Disisi lain perbedaan ideologi juga menjadi salah satu faktor konflik berkepanjangan terjadi di Afganistan, adanya perseteruan antara ideologi komunisme, islamisme, maupun nasionalisme menjadikan konflik di Afganistan tidak kunjung usai (Rois, C., & Rohaniyah, N. 2023, Juni 27) . Konflik yang terjadi di Afganistan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan tidak hanya berdampak pada infrastruktur negara, namun juga meluas ke aspek kehidupan lain seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya (Asirwadana. E, 2022).

Kegagalan demokrasi, melemahnya nilai-nilai kemanusiaan, serta terancamnya kehidupan masyarakat sipil di Afganistan, menarik perhatian negara-negara dunia untuk segera bertindak dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Afganistan. Untuk itu Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) membentuk sebuah misi politik dibawah Dewan Keamanan PBB yaitu *The United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya kondisi demokrasi Afganistan mulai memburuk sejak kepemimpinan Taliban menguasai Afganistan dalam kurun waktu lima tahun sejak 1996-2001. Hingga pada 11 September 2001, terjadinya peristiwa peledakan *World Trade Center* (WTC) yang menewaskan 3.000 warga Amerika Serikat (AS). Tragedi tersebut menjadi alasan AS untuk melakukan invasi ke Afganistan dengan menyerang kelompok Taliban yang diduga sebagai dalang yang melindungi kelompok Al-Qaeda yang menjadi dalang dibalik serangan WTC. Kedatangan pasukan AS di Afganistan melemahkan eksistensi Taliban yang sebelumnya telah memegang kekuasaan penuh di Afganistan.

Pada tahun 2002 UNAMA dibentuk atas permintaan pemerintah Afganistan yang merupakan tujuan dari misi politik Dewan Keamanan PBB. Pembentukan UNAMA sebagai respon internasional untuk membantu pencapaian perdamaian dan stabilitas pembangunan di Afganistan (Asirwadana. E, 2022). Dalam menjalankan misi perdamaian, UNAMA memegang 2 pilar penting



yang pertama yaitu terkait hubungan politik, yang mencakup adanya penguatan dalam sistem pemerintahan, unit penegak hukum, unit pemilu, unit penasehat militer, dan unit kepolisian. Kedua, yaitu pilar dalam bidang kemanusiaan dan rekonstruksi, yang berfokus pada unit kerja seperti unit HAM, unit penyedia bantuan, penasihat dalam pembangunan. Untuk dapat mencapai tujuan dari misi utama UNAMA, terdapat 4 hal yang menjadi prioritas utama yaitu proteksi kepada masyarakat sipil, proteksi atas kejahatan terhadap perempuan, perdamaian dan rekonsiliasi, serta penahanan.

UNAMA telah menjalankan misinya di Afganistan selama 22 tahun lamanya, sepanjang tahun tersebut beberapa pencapaian telah berhasil dilakukan oleh UNAMA, walaupun secara keseluruhan konflik kemanusiaan dan kelemahan demokrasi di Afganistan belum sepenuhnya teratasi. Salah satu isu yang kerap terjadi sejak dulu hingga kembalinya kepemimpinan Taliban di Afganistan yaitu kekerasan dan kebebasan perempuan di Afganistan sangat dibatasi, dimana hak asasi bagi perempuan tidak dapat terpenuhi. Kemudian pada 2009, Afganistan akhirnya mengadopsi sebuah hukum *Elimination Violence Against Women* (EVAW Law), yaitu sebuah hukum yang ditujukan untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di dalamnya terdapat larangan untuk menikah secara paksa, menikah dibawah umur, larangan bagi perempuan untuk berpendidikan, bekerja, dan menjamin akses kesehatan bagi perempuan. Kemudian pada tahun 2010, salah satu peran UNAMA untuk menciptakan perdamaian dengan membentuk sebuah program perdamaian dan reintegrasi Afganistan atau (APRP).

Kemudian di tahun 2021, AS menarik mundur pasukan keamanannya dari Afganistan yang menyebabkan terjadinya transformasi pemerintahan Afganistan yang kembali dibawah kepemimpinan Taliban. Hal ini menjadi tantangan baru bagi UNAMA untuk terus melanjutkan misinya di Afganistan. Dewan Keamanan PBB menyatakan adanya dukungan dari 14 negara termasuk China dan satu negara absen yaitu Rusia untuk melanjutkan resolusi UNAMA yang diperbarui pada resolusi di tahun 2022 pada resolusi 2626 (UNAMA.org). Resolusi baru ini memungkinkan adanya perpanjangan misi yang dilakukan oleh UNAMA dengan semua aktor dan politisi di Afganistan. Berdasarkan juru pembicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid juga menyatakan bahwa Taliban menyambut baik perpanjangan misi UNAMA dan berjanji untuk turut bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB (Shafiei. M & Overton. K, 2023).

Resolusi UNAMA terus memberikan kerangka normatif untuk mewujudkan perdamaian, pemerintahan yang inklusif, dan penegakan hak asasi manusia, namun dalam mengimplementasikannya dibatasi oleh tantangan keamanan dan kompleksitas geopolitik Afganistan. Berdasarkan hal ini UNAMA terus menyurati pihak Taliban untuk dapat menjalankan mandat UNAMA dalam menjaga perdamaian dan penegakan nilai-nilai demokrasi (Shafiei. M & Overton. K, 2023). Untuk itu UNAMA kerap memperbaharui resolusi setiap tahun dengan resolusi terbaru pada resolusi 2727 tahun 2024, yang berisi adanya perpanjangan misi UNAMA hingga 17 Maret 2025. Dengan kembalinya kepemimpinan Taliban di Afganistan, diperlukan langkah baru UNAMA untuk dapat berperan secara efektif untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Afganistan.

Peningkatan strategi komunikasi yang dilakukan Taliban 2.0 di era saat ini menjadi salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan oleh UNAMA untuk dapat berperan sebagai agen demokratis. Walaupun begitu sebagai institusi internasional perlu menegaskan pembukaan komunikasi dengan pihak Taliban bukan diartikan sebagai bentuk legitimasi terhadap rezim dan hal ini dapat berlaku hingga tercapainya misi politik UNAMA dalam menciptakan perdamaian dan



penegakan demokrasi di Afghanistan. Menurut Dr. Erica Gaston pada United Nations University, berpendapat bahwa untuk dapat mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang menjulang di Afghanistan adalah dengan membuka wacana politik yang lebih luas dengan Taliban, dan komunitas internasional berhak untuk mendorong pemerintahan yang inklusif dan penghormatan terhadap HAM terutama bagi perempuan dan anak perempuan (Gaston, 2021). UNAMA dapat berperan sebagai benteng dari masyarakat internasional yang dapat berbicara atas nama rakyat Afghanistan, kemampuan ini hanya dapat dilakukan oleh UNAMA, sebab dengan terpusatnya perhatian internasional terhadap situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Afghanistan meningkatkan potensi keterbukaan dari kelompok Taliban untuk dapat benar-benar meningkatkan demokrasi dan modernisasi di Afghanistan.

Rezim Taliban 2.0 memang mengubah strategi komunikasinya ke arah yang lebih modern dengan pemanfaatan media sosial dan platform digital. Namun dalam hal ini UNAMA harus tetap memberikan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan Taliban, apakah stabilitas keamanan, prinsip demokrasi, penegakan HAM, dan stabilitas pembangunan di Afghanistan telah berjalan dengan semestinya atau hanya sekedar bentuk propaganda Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Realitas Perkembangan Demokrasi dan HAM di Afghanistan

Untuk menyikapi gelagat strategi komunikasi politik Taliban yang mengalami perubahan, aspek yang penting untuk diamati adalah realitas sikap dan kebijakan pemerintahan Taliban setelah kemenangannya. Janji Taliban dalam pernyataan yang dibuat adalah bahwa mereka akan menerapkan praktik kehidupan yang lebih moderat dengan melindungi kehidupan dan kehormatan setiap warga negara, menganggap perlindungan nyawa warga negara sebagai prioritas, dan memperbolehkan perempuan untuk mendapatkan hak-hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sosial (Reuters, 2021). Selain itu, Taliban juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi mempercayai penggunaan kekerasan dalam pemerintahan. Namun pada faktanya, sejak Taliban resmi memenangkan Afghanistan, persepsi buruk tentang cedera demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan Taliban di masa lampau masih melekat di benak masyarakat internasional. Hal ini memicu ketidakpercayaan atas janji-janji dan komitmen yang berusaha dibangun oleh Taliban. Meskipun sejumlah pihak seperti Amerika Serikat dan negara Barat memandang positif perubahan yang Taliban buat dengan melihat kemauan Taliban dalam mengakui kesalahannya di masa lampau, kemampuan dialog negosiasi yang menghasilkan *US-Taliban talks*, dan adaptasi yang cepat pada media sosial dan teknologi (Asey, 2021). Akan tetapi, keputusan Taliban untuk secara terbuka melakukan perubahan—meskipun dalam hal ini penulis yakin sebagai upaya mendapatkan legitimasi internasional—sejatinya memberikan tantangan tersendiri kepada Taliban sebab pengawasan internasional menjadi lebih tajam tertuju kepadanya.

Perlu diakui bahwa keseriusan Taliban dalam perubahan komunikasi politik dan keterbukaan ini membuat semacam dikotomi dalam hal kepercayaan masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Taliban cukup mampu mempengaruhi citranya di mata dunia dengan perubahan pendekatan yang seakan lebih terbuka. Namun, untuk menjawab apakah Afghanistan benar-benar menjadi lebih demokratis dan peduli dengan hak-hak asasi manusia setelah citra tersebut dibangun harus dilihat melalui sudut pandang yang lebih observatif. Menurut studi yang dilakukan oleh *Afghan Analysts Network*, sejak kemenangannya, Taliban belum mampu menunjukkan kepada dunia visi masa depan Afghanistan utamanya yang berkaitan dengan janji-janji moderatnya, seperti pandangan dalam pendidikan, rekonstruksi, dan kesetaraan dengan



program yang berupaya mencapai *good governance*, kekuatan supremasi hukum, dan sebagainya. Taliban sejauh ini hanya mampu memberikan pernyataan yang umum, normatif, dan kabur.

Adapun, klaim perubahan yang berusaha digaungkan oleh Taliban belum bisa dikatakan berjalan karena beberapa fakta yang menandai stagnasi perkembangan demokrasi dan kesadaran hak asasi manusia di Afganistan. Pertama, Taliban tidak benar-benar serius dalam hal keterbukaan dan moderat sebab aksi protes masih membuat Taliban melibatkan kekerasan dan pasukan keamanannya. Seperti yang dilaporkan kepada Amnesty International, bahwa beberapa saat setelah Taliban memimpin Afganistan, 80 jurnalis yang memberitakan sebuah protes yang damai di Kota Herat mengalami penangkapan dan penyiksaan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Taliban dalam menerima kebebasan berekspresi padahal masih dalam konteks yang damai. Hal ini juga menunjukkan bahwa Taliban belum benar-benar menerapkan “kontrak sosial” yang telah mereka buat kepada masyarakat internasional, khususnya ketika Taliban mengatakan bahwa perlindungan nyawa warga negara adalah prioritas.

Membahas mengenai hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan di Taliban, terdapat inkonsistensi serupa. Pernyataan Zabihullah Mujahid sebagai juru bicara yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan memperoleh hak yang sama dalam bekerja dan beraktivitas tidak dapat dibuktikan. Pada perundingan intra-Afgan yang dilakukan di Doha, Taliban tidak memasukkan perempuan dan kelompok minoritas dalam negosiasi tersebut (Asey, 2021). Pada September 2021, pemerintah Afganistan membubarkan *Ministry of Women's Affairs* dan melarang perempuan untuk mengenyam bangku perkuliahan. Tampaknya Taliban memang serius terkait keinginannya melarang perempuan untuk bersekolah sebab pada Desember 2022, sekolah hanya diperbolehkan untuk perempuan di bawah kelas 6. Pemerintah juga memukul mundur perempuan dari kursi-kursi *non-governmental organization*. Hal ini tentu berdampak pada jumlah angkatan kerja perempuan di Taliban yang menurut *International Labour Organization* (ILO) menurun hingga 25% dihitung dari Agustus 2021–Maret 2023 (Menon, 2023). Lebih lanjut, pada Juli 2024, pemerintah Afganistan membuat kebijakan yang menutup paksa sumber penghasilan seperti salon kecantikan karena dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam. Bahkan hingga saat ini, perempuan masih dilarang untuk melakukan aktivitas olahraga apapun dan kebijakan untuk menggunakan burqa masih berlaku secara mutlak.

Gelagat keterbukaan pada modernisme yang ditunjukkan oleh Taliban melalui keputusannya dalam mengelola serius platform digital dan teknologi, tidak semerta-merta membuktikan bahwa Taliban telah berubah menjadi lebih moderat, demokratis, ataupun modern. Hingga saat ini, belum ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim yang dibuat oleh Taliban. Upaya dalam membangun citra demokrasi menggunakan komunikasi politik yang lebih terbuka dan platform digital sejatinya hanya retorika dan tidak didasarkan pada kesadaran atas demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan, dalam wawancara yang dilakukan oleh *PBS Newshour*, mantan komisaris Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan, Nader Nadery, mengatakan bahwa sangat sulit untuk membuat pemerintah saat ini mengubah kebijakan-kebijakannya terkait dengan hak asasi manusia dan perempuan ketika pemimpin tertinggi sudah menyatakan bahwa kualitas kehidupan perempuan di Afganistan sudah meningkat (PBS Newshour, 2023). Bahkan pada saat ini, pengaruh Amerika Serikat dan pihak eksternal dapat dikatakan lebih kecil dan tidak efektif karena Taliban sudah mempelajari fakta bahwa konsistensi yang mereka jaga telah membuahkan hasil untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.



PENUTUP

Simpulan

Kebangkitan Taliban di Afganistan pada 2020 lalu memberikan transformasi yang signifikan pada kondisi pemerintahan dan politik di Afganistan. Taliban dikenal sebagai kelompok yang memegang paham Islam konservatif yang menjadikan Afganistan sebagai pusat dari mujahidin di seluruh dunia, dimana hal ini membawa kondisi Afganistan di era 1996-2001 melalui masa-masa kelam dengan munculnya rezim Taliban 1.0 yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik keamanan dan terancamnya nilai-nilai demokrasi dan HAM di Afganistan. Pada era kebangkitan awal Taliban 1.0 strategi komunikasi Taliban untuk dapat menguasai Afganistan juga masih sangat terbatas, beberapa cara komunikasi yang digunakan Taliban hanya sebatas melalui kontak media seperti radio, televisi, surat kabar, tatap muka secara langsung, melalui *videotape*, maupun melalui penyebaran selebaran surat yang dikenal dengan *night letters*. Melalui cara tersebut Taliban dapat terhubung langsung dengan masyarakat, namun disisi lain keterbatasan dan distorsi komunikasi kerap terjadi, sehingga muncul propaganda dan kesalahan pengertian terkait kelompok Taliban. Beberapa kelompok seperti di wilayah Afganistan-Pakistan dapat memberikan pandangan positif terhadap kehadiran Taliban melalui minimnya informasi yang diterima, namun masyarakat internasional kerap berpandangan negatif terhadap Taliban yang berdampak pada memburuknya citra nasional dan terhambatnya legitimasi internasional pada Taliban.

Saran

Dengan bangkitnya rezim Taliban di tahun 2020, membuka momentum baru bagi Taliban untuk dapat mengubah citranya ke arah yang lebih moderat, toleran dan diplomatis. Keinginan Taliban untuk dapat mendapatkan legitimasi secara internasional menjadi motivasi utama Taliban untuk dapat terus memimpin di Afganistan. Untuk dapat mendapatkan pengakuan internasional maka rezim Taliban 2.0 mengubah strategi komunikasi dengan melakukan pendekatan komunikasi politik dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, berbagai konten berupa audio dan video dibuat oleh Taliban untuk menunjukkan citra positif dari kelompoknya. Komisi kebudayaan juga dibentuk oleh Taliban sebagai badan pengawas atas konten-konten yang dibuat dan diunggah ke media sosial.

Pembenahan kualitas demokrasi, keamanan, penegakan HAM, dan perdamaian di Afganistan juga menjadi kunci dari legitimasi internasional terhadap kelompok Taliban. Untuk itu momentum keterbukaan komunikasi Taliban dapat dimanfaatkan oleh UNAMA sebagai instrumen dan benteng utama internasional untuk tercapainya misi politik di Afganistan dalam mencapai perdamaian dan keamanan wilayah.

Namun, perubahan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Taliban 2.0 masih menimbulkan keraguan dari masyarakat internasional Janji-janji yang diberikan Taliban untuk dapat memperbaiki kondisi keamanan, demokrasi, dan penegakan HAM di Afganistan tidak berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan berbagai pelanggaran HAM yang diterima oleh jurnalis dan perempuan di Afganistan.

Untuk itu melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan Taliban 2.0 pada komunikasi ke arah platform digital tidak membuktikan bahwa kelompok Taliban telah berubah menjadi moderat, demokratis, dan modern. Perubahan yang dilakukan oleh Taliban bisa saja hanya terjadi sementara hingga tujuan politiknya dalam mendapatkan legitimasi internasional tercapai. Untuk itu peran institusi internasional seperti UNAMA masih sangat diperlukan untuk



dapat terus beroperasi dan mengawasi pemerintahan Taliban di Afganistan hingga tercapainya misi perdamaian, penegakan demokrasi dan ham di Afganistan dapat berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- About / UNAMA. (n.d.). United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Retrieved April 27, 2024, from <https://unama.unmissions.org/about>
- Ahmadzai, S. J. (2023, September 19). *US policy of 'pragmatic engagement' in Afghanistan risks legitimizing Taliban rule*. The Conversation. Retrieved April 27, 2024, from <https://theconversation.com/us-policy-of-pragmatic-engagement-in-afghanistan-risks-legitimizing-taliban-rule-211623>
- Amnesty International. (2022). *One year of Taliban's Broken Promises, Draconian Restrictions and Violence*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/afghanistan-one-year-of-the-talibans-broken-promises-draconian-restrictions-and-violence/>
- Anas, A. (2019). *To the mountains: My life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*. Oxford University Press.
- Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 71-83. https://www.researchgate.net/publication/368591825_Taliban_di_Afghanistan_Tinjauan_Ideologi_Gerakan_dan_Aliansi_dengan_ISIS
- Asirwadana, E. (2022, January). The Role Of The United Nations Assistance Mission In Afghanistan In Providing Human Rights Protection. *International Program of Law and Sharia, Faculty of Law*. https://www.researchgate.net/publication/357536303_the_role_of_the_united_nations_assistance_mission_in_afghanistan_in_providing_human_rights_protection
- Asey, T. (2021). *Taliban 2.0. – Have the Taliban really changed and learnt their lesson?* Retrieved from <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/taliban-2-0-have-the-taliban-really-changed-and-learnt-their-lesson/>
- Asyari, H., Jaya, T. P. (2019). *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta, Thafa Media.
- Atiq, S. (2021, September 7). *Taliban: Dulu melarang internet dan hancurkan pesawat televisi dan kamera, sekarang sangat aktif manfaatkan media sosial*. BBC. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58471604>
- Bose, P. (2020). *Intervention narratives: Afghanistan, the United States, and the global war on terror*. Rutgers University Press.
- Britannica. (2024). *The Value of Democracy*. Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/democracy/The-value-of-democracy>
- Byrd, W. (2022). *Let's Not Kid Ourselves: Afghanistan's Taliban Regime Will Not Become More Inclusive*. Retrieved from <https://www.lawfaremedia.org/article/lets-not-kid-ourselves-afghanistans-taliban-regime-will-not-become-more-inclusive>
- De Bruycker, I., & Rooduijn, M. (2021). The people's champions? Populist communication as a contextually dependent political strategy. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 98(3), 896-922.
- European Commission. (2023). *2 years after the Taliban takeover: Afghanistan's population need urgent humanitarian assistance*. Retrieved from <https://civil-protection-humanitarian->



- aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/2-years-after-taliban-takeover-afghanistans-population-need-urgent-humanitarian-assistance_en
- Febriana, H. (2021). Ancaman Keamanan Manusia: Sepak Terjang Taliban Menguasai Afghanistan. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 4(2), 51-61. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14016>
- Gaston, E. (2021). "Relief Is Not Enough: A Mandate for Diplomacy in Afghanistan." United Nations University. <https://carnegieendowment.org/publications/85646>
- Harmon, C. C., & Bowdish, R. G. (2018). *The Terrorist Argument: Modern Advocacy and Propaganda*. Brookings Institution Press.
- In the grip of hunger: only 5 percent of Afghan families have enough to eat | World Food Programme*. (2021, September 23). WFP. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.wfp.org/stories/grip-hunger-only-5-percent-afghan-families-have-enough-eat>
- Jensen, E., & Macdonald, K. (2023). Is Taliban 2.0 Closing The Gates To Ijtihad Again? *Stanford Journal Of International Law*, 75-89. <https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/10/59StanJIntlL75.pdf>
- Krishnankutty, P. (2023). *2 yrs of Taliban in Afghanistan — ways 'Taliban 2.0' is different, and not so different after all*. Retrieved from <https://theprint.in/theprint-essential/2-yrs-of-taliban-in-afghanistan-ways-taliban-2-0-is-different-and-not-so-different-after-all/1712784/>
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Liwal, E. M. (2021). *The role of media in selected aspects of governance in Afghanistan* (Doctoral dissertation, Brac University).
- LP2M Universitas Medan Area. (Desember, 2021). "Mengenal Desk Research: Definisi, Tips Beserta Contoh," lp2m.uma.ac.id.
- Maizland, L. (2023, January 19). *The Taliban in Afghanistan*. Council on Foreign Relations. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan>
- Mandate | UNAMA*. (n.d.). United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Retrieved April 26, 2024, from <https://unama.unmissions.org/mandate>
- Menon, S. (2023). *Afghanistan: The Taliban's broken promises*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/62469204>
- Munck, G. L. (2023). *Democratic Theory and Concept Formation: Ideals and Realistic Standards*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4365181
- Napier, M. (2023). *Afghan Air Wars: Soviet, US and NATO operations, 1979–2021*. Bloomsbury Publishing.
- Narayan, R. (2022). Afghanistan's Taliban 2.0 and Its Impact on Asia. *Global Asia*, 17(1), 85-89. https://www.globalasia.org/v17no1/feature/afghanistans-taliban-20-and-its-impact-on-asia_rajiv-narayan
- Naziri, A. (2022). *The nonfulfillment of democracy in Afghanistan: Why has the realization of democracy failed in Afghanistan within the last two decades?* University of Stavanger.
- Oluwashakin, A. (2022). Gender equality and protection for the girl-child education in conflict environments: The case of Afghanistan and Nigeria. *Journal of Contemporary International Relations and Diplomacy*, 3(1), 325-340.
- Prasetyo, C., Albayumi, F., & Hara, E. (2022). Perlibatan Private Military Company dalam Misi Perdamaian di Afghanistan oleh PBB di Tahun 2014. *Electronical Journal of Social*



- and Political Sciences*, 9(3), 184-197. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/33706/12197/>
- PBS Newshour. (2023). *Life in Afghanistan remains dire 2 years after collapse of U.S.-backed government*. Retrieved from <https://www.pbs.org/newshour/show/life-in-afghanistan-remains-dire-2-years-after-collapse-of-u-s-backed-government>
- Pratiwi, A. (2019, Februari 18). *Dulu Melarang, Sekarang Taliban Aktif Gunakan Internet dan Media Sosial*. Kompas.id. Retrieved April 27, 2024, from https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/18/dulu-melarang-sekarang-taliban-aktif-gunakan-internet-dan-media-sosial?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Rahman, H. (2022). *Afghanistan Under the Taliban 2.0: Aspects and Challenges*. Gaziosmanpasa University. https://www.researchgate.net/publication/367162990_Afghanistan_under_the_Taliban_20_Aspects_and_Challenges
- Rois, C., & Rohaniyah, N. (2023, Juni 27). *Praktik Politik Islam: Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan Dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan*. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.19 (1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/16369/6350>
- Rostow, N. (2022). *Reflections on the Consequences of the US Afghan Experience*. In *Israel Yearbook on Human Rights*, Volume 52 (2022) (pp. 89-120). Brill Nijhoff.
- Rosyidin, M. (2018). *20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh*. Deepublish.
- Saeed, S. (2021, August 20). *Taliban 2.0: Older, media-savvy and still duplicitous*. POLITICO.eu. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.politico.eu/article/taliban-afghanistan-rebrand-social-media-twitter-international-recognition/>
- Schäfer, A. (2023). *Digital heuristics: How parties strategize political communication in hybrid media environments*. *New media & society*, 25(3), 522-539.
- Scrivens, R., & Conway, M. (2019). *The roles of 'old' and 'new' media tools and technologies in the facilitation of violent extremism and terrorism*. In *The human factor of cybercrime*. Taylor & Francis.
- Seddiqi, F. A. (2020). *The process of nation building in Afghanistan in last three decades* (Master's thesis, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
- Shafiei, M., & Overton, K. (2023). *Mirage or Oasis? Assessing the Role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan*. *Asian Journal of Peacebuilding*, Vol.11 No.2, 257-276. doi: 10.18588/202311.00a398
- Sidiq, A. (2022). *Function of Mass Communication in the Social Development of Afghanistan*. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 2(4), 134-139.
- Suhrke, A., & Schmeidl, S. (2023). *Working with the Taliban: from the first to the second Emirate*. *Central Asian Survey*, 42(3), 518-536.
- Tatchou Nounkeu, C. (2020). *Political communication strategies of sub-Saharan Africa nationalist movements in the era of (de) colonization: The case of the UPC in Cameroon (1948–56)*. *Journal of African Media Studies*, 12(2), 123-136.
- Thomas, C. (n.d.). *Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress*. *Congressional Research Service*, 1-41. <https://sgp.fas.org/crs/row/R45122.pdf>



Werdiningsih, E., & B, A. H. (2022). Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Vol.24 No.1, 39-50. <https://likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/likhitapradnya/article/download/217/195/>